



Drs. H. ADANG DARADJATUN

## Serap Aspirasi warga Jakarta Utara

Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Adang Daradjatun mengisi masa reses dengan serap aspirasi warga Jakarta Utara.

Sebelum sesi aspirasi warga terlebih dahulu Pak Adang menyampaikan tentang tupoksi Komisi III dan Baleg DPR RI

Dalam sesi penyampaian aspirasi oleh warga, ada beberapa hal yang disampaikan di forum ini, antara lain, Mahasiswa bertanya soal bentrok saat demo RUU KUHP dan KPK. ada pula keresahan masyarakat akibat banyaknya kasus tuntutan hukum akibat UU ITE.



# Oposisi Konstruktif, Sebuah Pilihan Sadar

Alhamdulillah, kami ucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas perjalanan kinerja Fraksi PKS periode 2019 s.d 2024.

Sejak dilantik 1 oktober hingga akhir tahun 2019, genap tiga bulan Anggota Fraksi PKS DPR RI mengambil peran dalam kerja Parlemen. Usia yang 'Masih seumur jagung' dan perlu banyak belajar.

Sikap PKS jelas sejak awal, memilih jalan seperti bernama oposisi. Bukan karena tersisih dari kompetisi atau berbeda karena emosi. Kemudian mengambil pandangan politik asal beda, asal tidak sama. Tidak. Fraksi PKS menjaga jarak dengan penguasa, dalam kesadaran penuh menjadi penyeimbang yang konstruktif dan substantif untuk kesejahteraan Rakyat.

Meski dalam pilihan oposisi tidak ada dominasi sorot kamera dan gelimang jabatan, namun di jalan ini PKS berikhtir menjaga napas demokratis tetap hidup dan menyala. Mengemban amanah rakyat yang menginginkan



Sikap PKS jelas sejak awal, memilih jalan seperti bernama oposisi. Bukan karena tersisih dari kompetisi atau berbeda karena emosi. Kemudian mengambil pandangan politik asal beda, asal tidak sama. Tidak. Fraksi PKS menjaga jarak dengan penguasa, dalam kesadaran penuh menjadi penyeimbang yang konstruktif dan substantif untuk kesejahteraan Rakyat.

fungsi check and balances bagi Pemerintahan tetap berjalan optimal.

Faktanya sejumlah kebijakan Pemerintah jauh panggang dari api, beda antara janji dan realita. Jelang berganti tahun 2020 beragam

komoditas bahan pokok terkerek ke langit, ditengah rencana Pemerintah menaikkan luran BPJS, menyusul tarif tol yang telah naik, dan pajak pun mencekik. Padahal defisit neraca berjalan, hutang membengkak, dan perusahaan

negara terduga rugi "triliunan" rupiah. Ironisnya, proses bagi-bagi kuasa terus terjadi yang berujung pada tambunnya birokrasi dan in-efisiensi.

Beban rakyat makin berat, Fraksi PKS DPR RI mendengar dan merasakan beragam

persoalan kala turun reses. 50 Anggota Fraksi PKS menapakai dusun, desa hingga kota. Berinteraksi dengan generasi milenial, hingga "kolonial". Berjumpa dengan ratusan orang, berjalan ke lebih dari puluhan titik pertemuan dan membangun komunikasi dengan sejumlah pihak. Pilihan oposisi ternyata membersihkan optimisme bahwa sikap ini mendapatkan dukungan dari masyarakat. InsyaAllah.

Doakan kami istiqomah memperjuangkan RUU perlindungan ulama dan tokoh agama, bebas pajak dibawah penghasilan 8 juta, Surat Izin Mememudi (SIM) berlaku seumur hidup dan penghapusan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). InsyaAllah tidak akan usaha membohongi hasil, siapa yang menanam benih kebaikan maka akan menuai pucuk keberkahan.

Mari melangkah tegas melintas tahun yang baru, tetap rendah hati dan fokus mengawal demokrasi. Menghadirkan NKRI yang berdaulat tak sekedar narasi, namun melalui jutaan aksi nyata. Bismillah.

Humas Fraksi PKS DPR RI



# Pemerintah Didesak Perperan Aktif Jadi Penengah Konflik Uighur

Jakarta (27/12) — Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera mendesak Presiden Jokowi-Ma'ruf untuk berperan aktif menjadi penengah konflik Pemerintah Tiongkok dengan Etnis Uighur.

Mardani menagih janji kampanye Presiden Jokowi saat dapat capres yang lalu akan membangun hubungan internasional.

"Kita mendesak Pemerintah Jokowi speak up dan menginisiasi perda maian, men yelesaika

n konflik antara Pemerintah Beijing dengan etnis muslim Uighur. " Kata Mardani, Selasa (24/12).

Ketua DPP PKS itu mengingatkan Presiden Jokowi pada janjinya saat debat capres sesi keempat, Sabtu (30/2/2019) lalu yang mengatakan ia akan membangun hubungan inte

rnasio  
nal,

karena sangat dipercaya menangani kasus konflik di negara-negara lain, termasuk kasus penindasan yang menimpa warga muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. "Ini merupakan ujian terhadap konsistensi Presiden Jokowi," ujarnya.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jakarta Timur itu mengatakan, DPR juga akan melakukan diplomasi antar lembaga kepada Kongres Rakyat Nasional mendorong Pemerintah Beijing menghentikan cara kekerasan kepada etnis Uighur.

"DPR melalui Komisi I dan BKSAP akan terus mengupayakan melalui hubungan antar Parlemen," kata Mardani.

Mardani mengatakan, ada empat peran aktif yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjadi penengah konflik Beijing-Uighur :

Pertama, pemerintah bisa merangkul etnis Muslim Hui di Tiongkok yang memiliki hubungan baik dengan Beijing agar menjadi fasilitator mengusahakan konflik, menghentikan

DPR juga akan melakukan diplomasi antar lembaga kepada Kongres Rakyat Nasional mendorong Pemerintah Beijing menghentikan cara kekerasan kepada etnis Uighur. DPR melalui Komisi I dan BKSAP akan terus mengupayakan melalui hubungan antar Parlemen.

## Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

kekerasan Beijing kepada muslim Uighur dan mengajak kelompok Uighur agar tidak memberontak memisahkan diri.

Kedua, pemerintah Beijing bisa belajar dari Indonesia bagaimana Islam menjadi representasi agama yang damai sehingga tidak perlu takut karena sparatisme bukan bayaan dari ajaran Islam.

"Pemerintah Beijing bisa di perkenalkan Islam yang damai sehingga tidak perlu takut ancaman etnis muslim Uighur", ungkap Mardani.

Ketiga, pemerintah bisa mendorong negara-negara di ASEAN untuk berperan aktif menjadi mediator antar Uighur dan pemerintah Beijing.

"Seperti bagaimana ASEAN bersatu menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar", tegas Mardani.

Keempat, pemerintah harus mendesak pemerintah Beijing untuk menghentikan cara-cara kekerasan dan diskriminatif pada kamp-kamp re-edukasi. when we use violent , we don't get a get a good aim.

"Untuk membangun perdamaian, pemerintah tiangkong harus lebih mengedepankan cara-cara damai dan terus membangun Xinjiang", tutup Mardani.



# DPR: Pemerintah RI Harus Nyatakan Sikap soal Muslim Uighur

Saya sepakat untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri, jadi sesuai dengan politik luar negeri kita. Tapi jika terjadi penindasan, pelanggaran HAM dan Indonesia sebagai, apalagi ini definitif sekali yang ditindas, yang seperti yang di berita itu adalah orang Islam. Sementara Indonesia negara yang mayoritas muslim atau muslim terbesar itu saya kira tidak bisa tinggal diam

## Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Jakarta (26/12) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI sepakat dengan langkah pemerintah Indonesia untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri China terkait muslim Uighur.

Namun Abdul Kharis Al-masyahari meminta pemerintah untuk menyatakan sikap agar China memberikan kebebasan beragama terhadap warga negaranya.

"Menurut saya harus ada pernyataan sikap. Ya sikap itu bisa saja mengimbau jangan dilakukan pembatasan beribadah, berikan kebebasan

untuk menjalankan agama bagi muslim yang ada di Uighur. Ada keberpihakan terhadap penindasan pada muslim Uighur," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Al-masyahari dalam keterangan pers kepada media, Kamis (26/12/2019).

Kharis mengatakan pihaknya sepakat Indonesia tidak usah campur tangan dengan urusan dalam negeri China. Namun sebagai negara muslim, Indonesia diharapkan mengambil sikap.

"Saya sepakat untuk tidak ikut campur urusan dalam

negeri, jadi sesuai dengan politik luar negeri kita. Tapi jika terjadi penindasan, pelanggaran HAM dan Indonesia sebagai, apalagi ini definitif sekali yang ditindas, yang seperti yang di berita itu adalah orang Islam. Sementara Indonesia negara yang mayoritas muslim atau muslim terbesar itu saya kira tidak bisa tinggal diam," kata Anggota DPR dari Fraksi PKS ini.

Minimal degan statement, oke, lanjut Abdul Kharis, kita tidak akan mencampuri urusan dalam negara lain sebagai sikap kita selama ini kepada seluruh negara di dunia, karena bebas aktif.

"Tapi pernyataan dukungan, sikap pemerintah Indonesia itu tak bisa tinggal diam terkait dengan adanya hal-hal seperti yang banyak negara menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di China, di Uighur," imbuhnya.

Terkait dengan rencana sejumlah ormas Islam di Indonesia yang akan menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar China di Jakarta, pada Jumat (27/12) dalam rangka merespon dugaan penindasan etnis Muslim Uighur di Xianjiang, China, Wakil Rakyat asal Solo ini dengan tegas



mendukung dan meminta agar aksinya berjalan damai dan pesan dukungan untuk Uighur dari aksi itu mendunia.

"Aksi nanti saya harap berjalan tertib, damai dan memang menjadi kegelisahan kita bersama bagaimana respon umat Islam Indonesia, saya harap pihak Kedubes Tiongkok bisa memfasilitasi dan menjelaskan kepada massa

sejernihnya dan pihak Dubes Tiongkok juga harus melihat bahwa aksi nanti adalah solidaritas umat Islam terhadap saudara mereka dibelahan bumi lainnya wakil khusus Xinjiang, Tiongkok sehingga pesan aksi ini bisa sampai Beijing dengan baik" tutup Kharis.

foto : dpr.go.id



# Komisi I Tinjau Kesiapan Korem Wirabraja Hadapi Kontinjensi Sumbar

Tentu harapan kita, anggaran ini bisa meningkatkan kemampuan TNI baik dalam personel ataupun peralatan alutista.

**Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.**

Anggota Komisi I DPR RI

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi I DPR RI meninjau kesiapan Markas Komando Resor Militer (Korem) 032/Winabraja dalam melaksanakan tugas pokok untuk mengatasi ancaman yang muncul di Provinsi Sumatera Barat. Anggota Komisi I DPR RI Al Muzammil Yusuf mengatakan, dalam dalam konteks anggaran, Kementerian Pertahanan dan TNI mendapatkan alokasi anggaran yang terbesar, yaitu sebesar Rp 131,18 triliun.

Tim Kunker Komisi I DPR RI disambut langsung oleh Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, Danlantamal II Padang Laksuma TNI Dafit Santoso, dan Danlanud Sultan Sjahrir diwakili oleh Kasislog Lanud Letkol Kal

Dirman Hutri, Kapokwil Kemhan di Sumbar beserta jajarannya, di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/12/2019).

"Tentu harapan kita, anggaran ini bisa meningkatkan kemampuan TNI baik dalam personel ataupun peralatan alutista," kata Muzammil, yang turut didampingi Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan dan Dede Indra Permana (F-PDIP), HI Lodewijk E. Paulus (F-Golkar), Willy Aditya (F-NasDem), Darizal Basir (F-Demokrat), Muhammad Iqbal (F-PPP), Syaiful Bahri Anshori dan Helmy Faizal Zaini (F-PKB), Darizal Basir (F-Demokrat), dan Muhammad Iqbal (F-PPP).

Berbagai potensi ancaman, berdasarkan paparan Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo,

diantaranya kemungkinan kontinjensi seperti bencana alam, konflik sosial, imigran gelap, pelanggaran pelayaran, hingga terorisme. Untuk itu, Danrem menyarankan perlu adanya latihan terintegrasi antar lembaga dalam rangka kewaspadaan nasional, serta perlu adanya pembuatan sisfo terpadu guna pelaksanaan tugas tersebut.

Adapun mengenai fasilitas dan personel wilayah, Danrem mengatakan perlu adanya peningkatan produktivitas sehingga personel harus dilengkapi dan disiapkan sarana dan prasarannya untuk menghadapi kontinjensi sehingga dapat bergerak cepat untuk berada garda terdepan. (aiw/sf)

Foto :  
dpr.go.id

# Toriq Hidayat Kritik Israel yang Tidak Hormati International Criminal Court

“Keberpihakan ICC pada Palestina menjadi bukti bahwasanya memang ada kejahatan kemanusiaan yang selama ini dilakukan oleh Israel”

**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (24/12) — Anggota Komisi 1 DPR-RI, Toriq Hidayat, mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyerang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dengan tuduhan Anti-Semitisme.

Peristiwa ini terjadi setelah ICC menyatakan akan melakukan investigasi kejahatan perang yang

dilakukan Israel yang dilakukan terhadap bangsa Palestina.

“ICC merupakan organisasi internasional yang harus dihormati oleh setiap negara, dan tidak sepatutnya Israel memberikan tuduhan yang tidak berdasar seperti itu” ujar Toriq dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/11).

Ia juga berpendapat bahwa rencana ICC tersebut tentunya telah didasari pertimbangan dan fakta-fakta yang kuat.

“Keberpihakan ICC pada Palestina menjadi bukti bahwasanya memang ada kejahatan kemanusiaan yang selama ini dilakukan oleh Israel” tegas anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Barat 11 ini.

Lebih jauh lagi, anggota Komisi 1 DPR ini juga menghimbau seluruh negara di dunia untuk mendukung ICC dalam melakukan investigasi terhadap Israel dan menyeret para pelaku kejahatan kemanusiaan ke pengadilan.

Menurutnya, negara-

negara di dunia perlu memandang posisi ICC sebagai organisasi yang memiliki legitimasi hukum di tingkat internasional.

“Sebagai bentuk komitmen terhadap perjuangan bangsa Palestina, Indonesia juga harus mendukung penuh rencana penyelidikan ini” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ketua Jaksa Penuntut ICC Fatou Bensouda mengungkapkan bahwa ICC akan melakukan investigasi terkait dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina pada Jumat (20/12).

Pengumuman ini juga merupakan kelanjutan dari penyelidikan awal terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel sejak tahun 2014.

Sebagai respon dari rencana tersebut, Perdana Menteri Israel menuduh ICC sebagai Lembaga yang anti-semit karena dianggap menyudutkan negaranya.





Pemerintah melalui kementerian, Kemendagri, Kemenpan RB bekerja sama dengan pemerintah daerah Papua, Polri, Kejaksaan, BPK, KPK harus serius menangani permasalahan efisiensi anggaran, manajemen pemerintahan dan pelayanan publik di Papua

## H.SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (24/12) — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyatakan bahwa operasi militer di Papua bukan solusi utama penyelesaian masalah Papua.

Melalui pesan tertulis Sukamta mengatakan operasi militer di Papua akan menimbulkan sikap antipati dan kekerasan lanjutan sesama warga negara Indonesia maupun terhadap aparat TNI-Polri.

"Pendekatan keamanan dengan mengedepankan operasi militer di Papua telah dilakukan ketika masa Orde Baru untuk menyelesaikan masalah separatisme di Papua," ungkap Sukamta.

Menurut Sukamta, kasus Biak Berdarah (1998), Wasior

# Operasi Militer Bukan Solusi Utama Permasalahan Papua

Berdarah (2001), Wamena berdarah (2003), dan Paniai (2014) dan terakhir di Wamena 2019 menjadi bukti bahwa pendekatan militer ternyata menciptakan siklus kekerasan tanpa akhir.

"Masalah OPM tidak akan selesai jika akar masalah Papua tidak terselesaikan secara tuntas. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua harus serius memenuhi kebutuhan standar minimal untuk kesehatan, pendidikan sampai level menengah atas, kesejahteraan dengan menurunkan angka kemiskinan dibawah 10 persen, kemudian komunikasi setara Jakarta Papua," papar anggota DPR RI asal Yogyakarta ini.

Pendekatan kedua lanjut Sukamta yakni deradikalisasi dan deideologi gerakan Papua Merdeka.

"Pendekatan ini melibatkan BNPT yang sudah berpengalaman dalam penanggulangan terorisme untuk Papua terjun ke kantong-kantong ideologisasi Gerakan Papua Merdeka di dalam dan luar negeri. Ideologi Papua Merdeka harus diubah menuju nasionalisme NKRI harga mati," ungkapnya.

Sukamta melanjutkan Pendekatan ketiga adalah perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

"Pemerintah melalui kementerian, Kemenpan RB bekerja sama dengan pemerintah daerah Papua, Polri, Kejaksaan, BPK, KPK harus serius menangani permasalahan efisiensi anggaran, manajemen pemerintahan dan pelayanan publik di Papua," tutur Sukamta.

Sejak tahun 2001 hingga 2019, kata Sukamta, total dana otsus untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 83 triliun dan pada tahun 2020 dialokasikan 8,37 triliun, namun perkembangan peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik tidak berubah signifikan.

"Pemerintah pusat harus serius mengawal dana Otsus ini bukan hanya transfer dana ke daerah lalu berlepas tangan dalam mengawal pengelolaan dan pencapaian target-targetnya," tutup Sukamta



# Pengangkatan Wakil KSP Bentuk Pemborosan Anggaran

Keberadaan wakil kepala staf kepresidenan yang diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Wakil Menteri, semakin memberatkan anggaran pendapatan belanja negara

**Dr. KH. SURAHMAN  
HIDAYAT, M.A.**

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (26/12) — Perpres Nomor 83 Tahun 2019 sebagai dasar jabatan baru wakil kepala staf kepresidenan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo menuai respon Anggota DPR RI Fraksi PKS, Surahman Hidayat.

Menurut Surahman Hidayat kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran.

"Perpres No. 26 Tahun 2015 menjelaskan fungsi KSP adalah membantu presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan program prioritas nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis", ungkap Surahman.

Surahman menambahkan, dengan tupoksi yang sama, yang pasti tidak diperlukan lagi wakil KSP.

"Keberadaan wakil kepala staf kepresidenan yang diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Wakil Menteri, semakin memberatkan anggaran pendapatan belanja negara,"

ungkapnya.

Kata Surahman, saat ini rakyat dibebani dengan berbagai bentuk pajak, sampai beli barang impor di E-Commerce Rp 42 ribu dikena bea masuk, ini pemerintah membuat jabatan baru yang membebani anggaran negara, kebijakan ini memperlihatkan Presiden tidak aware dengan kondisi rakyat yang memiliki beban hidup semakin berat.

"Pos wakil kepala staf kepresidenan tidak lebih dari kebijakan akomodatif presiden, karena masih ada pendukungnya yang belum mendapatkan jabatan", tegasnya.



# DOB Baru Jangan Dianggap Beban Keuangan

rlu ada upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan pembangunan diseluruh masyarakat Indonesia secara bersama-sama. “Kalau dilihat memang ada kesulitan tapi jangan dilihat dari sudut pandang itunya saja, tapi dicari bagaimana melakukan pemerataan pembangunan serta mengakselerasi daerah, ini akan lebih optimal,

## **TEDDY SETIADI, S.I.Kom.**

Anggota Komisi II DPR RI

Anggota Komisi II DPR Teddy Setiadi dari Fraksi PKS mengatakan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) seharusnya jangan dianggap sebagai beban keuangan Pemerintah Pusat semata, tetapi juga dalam rangka mensejahterakan masyarakat sehingga dapat mewujudkan keadilan fiskal untuk masyarakat Jabar.

Teddy mengajak Gubernur dan masyarakat Jabar serius dalam pembentukan DOB dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang mampu memperkuat otonomi

daerah. “Karena itu kita mengajak Gubernur Jabar lebih serius dalam pembentukan DOB, agar mampu berakselerasi dan berkolaborasi seperti daerah daerah lainnya, melihat Jawa Barat memiliki potensi yang besar,”ujarnya kepada Parlemenaria saat Kunker Komisi II DPR ke Jabar baru-baru ini.

Menurutnya, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan pembangunan diseluruh masyarakat Indonesia secara bersama-sama. “Kalau dilihat memang ada kesulitan tapi jangan dilihat dari sudut

pandang itunya saja, tapi dicari bagaimana melakukan pemerataan pembangunan serta mengakselerasi daerah, ini akan lebih optimal,”paparnya.

Menurutnya, jika berpikir pemerataan pembangunan kita harapkan akan ada ruang untuk melakukan inovasi, kolaborasi sehingga kesejahteraan masyarakat disebut daerah bisa lebih terpacu. “Apalagi kalau kita bicara tentang daerah-daerah lain, Komisi II sering menerima masukan DOB berbagai daerah, karena itu kita meminta Gubernur Jabar memimpin pembentukan DOB Jabar dengan kajian-kajian komprehensif, seperti latar belakang dan solusinya,”jelasnya.

Sebelumnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluhkan bahwa Jabar dengan penduduk hampir 50 juta jiwa namun hanya terdapat 27 kabupaten atau kota. Keluahnya, ada salah satu provinsi di Indonesia yang berpenduduk kurang dari 5 juta jiwa namun dipimpin oleh satu gubernur dan 17 pemerintah daerah kabupaten/kota. “Yang sudah siap DOB sudah banyak, kalau pakai rasio di Jawa Timur,



harusnya di Jawa Barat itu 40 daerah,”paparnya.

Terkait DOB, dia menjelaskan, pemerintah pusat berpendapat pemekaran banyak yang gagal. Hal itu bisa

saja berlaku di luar Pulau Jawa, karena terbentuk persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain-lain. (si)

Foto : dpr.go.id

# Aus Hidayat Nur: Saya Tunggu Menteri PUPR Berkantor di Kaltim

Kita akan terus menagih janji pemerintah, termasuk janji Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Basuki Hadimuljono. Bahwa beliau berjanji akan berkantor di Kaltim. Selama Kementerian PUPR belum berkantor di Kaltim, maka harapan Ibukota Negara pindah itu masih jauh.

**KH. AUS HIDAYAT NUR**

Anggota Komisi II DPR RI / Dapil Kaltim

Samarinda (23/12) — Aus Hidayat Nur setelah bertemu Gubernur Kalimantan Timur untuk mengawali Resesnya, lanjut bertemu rekan-rekan media di Kalimantan Timur.

"Saya mengajak teman-teman media bercengkrama sore hari ini untuk mendengar apa yang sedang menjadi isu masyarakat Kalimantan Timur hari ini, karena teman-teman media sehari-harinya berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa

di masyarakat. Jadi sebelum saya bertemu langsung dengan masyarakat, saya ingin mendengar ringkasan isu di masyarakat dari teman-teman media," ujar KH. Aus Hidayat Nur mengawali perbincangan di Yen's Delights Coffee.

Sebanyak 23 wartawan dari 19 media tampak hadir menikmati kopi di Kota Tepian Samarinda. Setelah masing-masing mengenalkan diri, setiap media tampak antusias menyampaikan potret masyarakat Kalimantan Timur terkini.

Dari sekian potret sosial masyarakat Kalimantan Timur, isu tentang perpindahan Ibukota Negara menjadi tema menarik yang hangat dibicarakan, terlebih Aus Hidayat Nur merupakan satu-satunya Wakil Rakyat Kaltim yang bertugas di Komisi II DPR RI.

"Saya sudah tegaskan ke Gubernur tadi, bahwa saya akan terus mengawal perpindahan Ibukota Negara ke Kaltim," tegas Aus Hidayat Nur.

Aus Hidayat Nur menambatkan PKS mendukung atau tidak sangat tergantung pada apakah perkembangan proses perpindahan Ibukota ini membawa manfaat bagi masyarakat atau tidak,



khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Sebab oposisinya PKS adalah oposisi kritis konstruktif, oposisi kami dalam rangka keberpihakan pada rakyat.

"Makanya PKS menempatkan saya di Komisi II yang terkait Kemendagri dan persiapan perpindahan Ibukota ini. Karena PKS melihat perlu ada pengawalan rencana perpindahan Ibukota ini. Dan

kalaupun PKS tidak menempatkan saya di Komisi II, maka tidak ada wakil Kaltim di Komisi II. Karena anggota DPR RI Dapil Kaltim dari partai lainnya tidak ditempatkan di Komisi II," tambah KH. Aus Hidayat Nur.

Aus Hidayat Nur hanya berpesan PKS terus berjuang agar Ibukota Negara jadi pindah ke Kalimantan Timur.

"Dan kita akan terus menagih janji pemerintah,

termasuk janji Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Basuki Hadimuljono. Bahwa beliau berjanji akan berkantor di Kaltim. Selama Kementerian PUPR belum berkantor di Kaltim, maka harapan Ibukota Negara pindah itu masih jauh. Jadi, saya tunggu beliau berkantor di Kaltim," tutup Aus Hidayat Nur.

# Pengangkatan Irjen Pol. Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya dinilai tepat

Harapan saya, Irjen Nana dapat melanjutkan program Pak Gatot sebelumnya. Kerja-kerja bagus dari Kapolda sebelumnya harus dilanjutkan disertai dengan inoovai baru yang dibutuhkan

## Habib ABOEBAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Polda Metro memerlukan profil seperti Irjen Nana Surdjana yang tidak banyak bicara namun banyak aksinya.

Profilnya mirip dengan kapolda yang lama, kerja sangat taktis. Sehingga langkah yang diambil tidak menimbulkan kontroversi.

Latar belakang Irjend Nana Surdjana yang banyak menangani intelkam akan sangat bermanfaat untuk menjaga keamanan ibu kota.

Beliau pernah dipercaya menjabat direktur Intelkam Polda Metro Jaya, pernah juga

menjadi Analis Utama Tingkat III Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, selain itu beliau pernah memimpin Direktorat Intelkam Polda Jateng.

Kemudian beberapa kali menempati posisi di Baintelkam Polri, yang kemudian menjadi direktur Intelkam Polda Jatim.

Apresiasi gubernur NTB terhadap Irjen Nana adalah salah satu bukti keberhasilan beliau memimpin institusi dan menjalin hubungan dengan stakeholder.

Profil yang dapat

berkomunikasi dengan baik kepada seluruh pihak seperti beliau ini samgay cocok memimpin polda metro, karena Jakarta di huni banyak pihak dengan berbagai dinamikanya.

Karenanya kapolri tidak salah pilih menunjuk Irjen Nana sebagai Kapolda Metro.

Harapan saya, Irjen Nana dapat melanjutkan program Pak Gatot sebelumnya. Kerja kerja bagus dari Kapolda sebelumnya harus dilanjutkan disertai dengan inoovai baru yanhdibutuhkan.



Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, SH, MH :

# Meski Dbolehkan Kembali ke Dunia Politik, Mantan Napi Korupsi Harus Sadar Diri

Anggota Komisi III DPR RI, Achmad Dimiyati Natakusumah menilai putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 4/PUU-VII/2009 terkait Mantan terpidana yang telah menjalani masa pidana yang harus menunggu lima tahun jika ingin mengajukan diri dalam dunia politik itu sudah final and binding atau sudah final dan mengikat. Meski demikian ia menyarankan agar mantan Napi termasuk kasus korupsi agar sadar diri dan istirahat dari dunia politik.

"Putusan MK itu sudah final and binding, artinya sudah final dan mengikat, jadi harus diikuti oleh seluruh pihak. Meski demikian, menurut saya mantan napi yang sudah diputus bersalah (inkrah) sejatinya sadar diri, dan istirahat saja dari dunia politik. Karena kasihan dengan citra partai yang akan menjadi buruk dari sana. Jadi ya menurut, saya istiqomah saja," ujar Dimiyati di Medan Sumatera Utara, baru-baru ini.

Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, dalam dunia politik terlebih lagi untuk mengikuti ajang pemilihan

Dalam dunia politik terlebih lagi untuk mengikuti ajang pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif yang melibatkan kesertaan suara rakyat itu tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis saja, melainkan juga aspek sosiologis dan filosofis. Akan sangat kasihan jika sebuah daerah dipimpin oleh mantan napi apalagi napi koruptor.

## Dr. H. R. A. Dimiyati Natakusumah, SH, MH

Anggota Komisi III DPR RI

kepala daerah atau pemilihan legislatif yang melibatkan kesertaan suara rakyat itu tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis saja, melainkan juga aspek sosiologis dan filosofis. Akan sangat kasihan jika sebuah daerah dipimpin oleh mantan napi apalagi napi koruptor.

Bahkan tidak hanya itu, mantan narapidana korupsi pasti sudah mengetahui cara-cara berbuat korupsi. Bukan tidak mungkin akan memudahkan langkahnya untuk

buat kasus serupa, ya tidak bisa juga disalahkan masyarakat yang memilih," paparnya.

Dimiyati menilai masih banyak cara lain mengabdikan dan berjuang untuk bangsa, negara dan agama, selain melalui jalur politik. Misalnya menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dosen ataupun pejabat publik lainnya yang tidak menuntut suara masyarakat alias dipilih langsung oleh Presiden, seperti Menteri, duta besar

dan lain sebagainya. (ayu/es)

Foto : dpr.go.id



# Petani Milenial Minta Dikirim PPL yang Mumpuni

Jika semua PPL melaksanakan tugasnya tersebut dengan baik, jelas petani akan terbantu dan kemajuan pertanian kita akan mengalami percepatan yang signifikan. Tidak jalan di tempat seperti sekarang ini

**Dr. HERMANTO,  
S.E., M.M.**

Anggota Komisi IV DPR RI

Kab. Tanah Datar (27/12) — Anggota DPR RI Hermanto dalam perjalanan reses perorangannya di Kabupaten Tanah Datar, Kamis (26/12) malam, bertemu dengan petani milenial Jorong Saptamarga Tanjung Odang, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara.

Petani milenial tersebut meminta Pemerintah agar meningkatkan kapasitas PPL (penyuluh pertanian lapangan) setempat.

"Pak, kirim kepada kami PPL yang ahli", keluh Mamat kepada Hermanto.

Ia berharap PPL di tempatnya bisa menjadi tempat bertanya dan memberi solusi atas berbagai masalah yang dialami petani. "PPL di kami malah lebih sering tanya ke petani", ucapnya.

"PPL di tempat lain, dari warna daun saja dia sudah tahu bahwa tanaman itu kurang unsur hara tertentu", tambahnya.

Hermanto menyambut baik aspirasi tersebut. "Kita upayakan. Memang seharusnya PPL itu menjadi tempat bertanya dan memberikan solusi atas berbagai masalah pertanian yang dihadapi

petani," ujar legislator dari FPKS ini.

Kalau saat ditanya oleh petani belum bisa jawab, lanjutnya, maka PPL harus proaktif mencari jawabannya.

Untuk hal tersebut ia bisa tukar pikiran dengan sesama PPL baik langsung maupun via medsos, mengkonsultasikannya kepada atasan, membuka internet atau menggunakan cara-cara lainnya.

"Setelah ia dapatkan, maka jawaban itu segera infokan kepada petani yang bertanya tersebut", ucap Hermanto

"Jika semua PPL melaksanakan tugasnya tersebut dengan baik, jelas petani akan terbantu dan kemajuan pertanian kita akan mengalami percepatan yang signifikan. Tidak jalan di tempat seperti sekarang ini", pungkask legislator dari dapil Sumbar 1 ini.



# Korban Laka Bus Sriwijaya Berhak atas Santunan dan Biaya Perawatan

Tidak ada alasan bagi perusahaan angkutan untuk tidak menanggung seluruh biaya perawatan dan santunan bagi korban yang meninggal. Apalagi, UU LLAJ juga sudah mewajibkan setiap perusahaan angkutan umum untuk ikut asuransi

## Ir. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (25/12) - Komisi V DPR RI meminta PO bus Sriwijaya menanggung biaya perawatan dan memberikan santunan kepada seluruh penumpang yang menjadi korban.

Anggota komisi V Fraksi PKS Sigit Sosiantomo mengungkapkan, menyusun kecelakaan tunggal bus PO Sriwijaya di Liku Lematang, Desa Prahau Dipo, Kecamatan Dempo Selatan,

Kota Pagalaran, Sumatera Selatan pada Selasa (24/12/2019) yang menewaskan 24 penumpang.

"Kami prihatin atas berulangnya musibah kecelakaan bus seperti ini. Terlebih sebagian besar penumpangnya tewas. Dan sudah menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan untuk memberikan santunan dan menanggung seluruh biaya perawatan korban," kata Sigit.

Pasal 188, 234 dan 235 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kata Sigit, sudah mengatur mengenai kewajiban perusahaan angkutan umum dan pengemudi untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat terjadinya kecelakaan.

"Jadi, tidak ada alasan bagi perusahaan angkutan untuk tidak menanggung seluruh biaya perawatan dan santunan bagi korban yang meninggal. Apalagi, UU LLAJ juga sudah mewajibkan setiap perusahaan angkutan umum untuk ikut asuransi", tegas Sigit.

Berdasarkan pasal 234 dan 235 UU LLAJ, Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan

Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelaianan Pengemudi.

"Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahliwaris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana", ungkapnya.

Sigit menambahkan, jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

"Selain berhak mendapatkan santunan dan biaya perawatan dari perusahaan angkutan, korban kecelakaan juga berhak mendapatkan pertolongan dan biaya perawatan dari pemerintah dan santunan dari asuransi, sebagaimana diatur dalam



pasal 240 UU LLAJ," papar Sigit.

Seperti diketahui, bus Sriwijaya mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari Bengkulu menuju Palembang. Namun, saat melintas di tikungan tajam,

mobil bus dengan plat nomor BD 7031 AU tersebut hingga terperosok ke jurang hingga menyebabkan 24 orang penumpang tewas, termasuk sopirnya.

Foto dpr.go.id

## Kecelakaan Bus Sriwijaya

# Ahmad Syaikh Desak Pemerintah Tingkatkan Pengawasan

di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan. Contoh, praktik Uji KIR yang lebih banyak formalitasnya dan masih banyaknya permainan antara pemilik PO Bus, pengemudi, dengan oknum petugas dinas perhubungan membuat angkutan jalan menjadi jauh dari standard keselamatan yang diharapkan

## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (26/12) Anggota Komisi V DPR Ahmad Syaikh prihatin, dengan terjadinya kecelakaan Bus Sriwijaya yang menewaskan 38 orang dan 6 luka-luka.

Politisi PKS itu mendesak, pemerintah segera menyelidiki penyebab kecelakaan bus terjadi dan meningkatkan pengawasan terhadap kelaikan moda transportasi umum.

Penyebab kecelakaan ini diduga karena supir mengantuk dan setelah dilakukan ramp check bus tersebut juga terbukti tidak dalam kondisi layak jalan.

"Peristiwa ini sungguh

memprihatinkan. Bagaimana bisa bus yang tidak layak jalan diizinkan beroperasi?", ujar Syaikh.

Kecelakaan ini bukti tidak adanya kontrol optimal dan reguler dari pemerintah. Karena itu, Syaikh mendesak agar pemerintah meningkatkan pengawasan.

"Pemerintah harus meningkatkan pengawasan agar kejadian tragis tersebut tidak terulang," tegas Syaikh yang mewakili Dapil Jabar VII meliputi Kab. Bekasi, Karawang dan Purwakarta itu.

Menurut Syaikh, kejadian ini kerap terjadi. Masih segar dalam ingatan kecelakaan beruntun di jalan tol

Purbaleunyi yang melibatkan beberapa kendaraan, juga diakibatkan kendaraan yang tidak layak jalan.

Padahal sesuai amanat UU No.22 Tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seharusnya penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan wajib memenuhi standar keselamatan.

Syaikh melihat, di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan. Contoh, praktik Uji KIR yang lebih banyak formalitasnya dan masih banyaknya permainan antara pemilik PO Bus, pengemudi, dengan oknum petugas dinas perhubungan membuat angkutan jalan menjadi jauh dari standard keselamatan yang diharapkan.

Selain itu pengurusan KPS (Kartu Pengawasan) yang lama dan berbelit-belit akibat belum sinkronnya sistem layanan online antara Direktorat Angkutan dan Multimoda (AMM) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub dengan kondisi di lapangan juga berkontribusi terhadap lemahnya pengawasan.

Syaikh melihat peristiwa ini sebagai momentum reformasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Yani dengan segera merevisi UU No.22 tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian diikuti dengan perbaikan sistem dan modernisasi peralatan dalam rangka pengaturan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih baik.

Seperti diberitakan sebelumnya, bus naas tersebut berangkat dari Bengkulu menuju Palembang. Awalnya bus membawa 27 penumpang. Di tengah

perjalanan, bus menaikkan sejumlah penumpang gelap.

Bus kemudian mengalami kecelakaan dengan terjun ke jurang ketika melintas di Liku Lematang, Desa Prah Dipo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagalaran, Sumatera Selatan, Selasa (24/12/2019).

Foto : dpr.go.id



Peningkatan kapasitas produksi ini pasti akan berdampak pada kondisi lingkungan sekitar. Untuk itu PLTU harus benar-benar menyiapkan infrastruktur yang memadai agar kondisi lingkungan di sekitar tidak tercemar

**Dr. H. MULYANTO,  
M.Eng**

Anggota Komisi I DPR RI

Tangerang (25/12) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Mulyanto minta jajaran PLN lebih memperhatikan pengelolaan lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lontar, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Aspek pemeliharaan dan kelestarian lingkungan di sekitar pembangkit perlu mendapat perhatian serius agar keberadaan PLTU Lontar bisa aman dari gangguan sosial serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Demikian disampaikan Mulyanto saat kunjungan reses masa persidangan I, Tahun 2019, ke

# Program Bina Lingkungan PLTU Kronjo Perlu Diperluas

PLTU Lontar, Selasa (24/12).

Mulyanto berkunjung ke pembangkit listrik berkapasitas produksi 3 x 315 megawatt (MW) itu dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat di sekitar pembangkit. Turut dalam kunjungan tersebut anggota FPKS DPRD Provinsi Banten, Asnin Syafiudin dan DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Syahril.

"Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa sejak PLTU Lontar ini didirikan, kegiatan mencari ikan di laut menjadi sulit. Sebelumnya masyarakat bisa mendapatkan ikan di sekitar pantai tapi sekarang harus ke tengah laut untuk mendapat tangkapan yang maksimal", ungkap Mulyanto.

Mulyanto menambahkan Hari ini kami berkunjung secara langsung bermaksud mengkonfirmasi dan berkordinasi untuk mencari solusi.

"Secara umum pelaksanaan operasional PLTU Lontar sudah baik. Capaian kerja dan kinerja manajemen sudah sesuai dengan target yang diharapkan", tuturnya.

Namun, Mulyanto mengingatkan agar jajaran direksi dan manajemen untuk

memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan. Apalagi pada tahun 2020 kapasitas produksi PLTU Lontar akan ditingkatkan menjadi 4 x 315 MW.

"Peningkatan kapasitas produksi ini pasti akan berdampak pada kondisi lingkungan sekitar. Untuk itu PLTU harus benar-benar menyiapkan infrastruktur yang memadai agar kondisi lingkungan di sekitar tidak tercemar", imbuh Mulyanto.

Sebab jika masalah lingkungan tidak diperhatikan dengan serius, lanjut Mulyanto, pihaknya khawatir akan mengganggu masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada kelancaran operasional PLTU.

Menanggapi hal tersebut Direktur Utama Indonesia Power, M. Ahsin Sidqi akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan. Pihaknya akan membangun kerjasama dengan masyarakat agar setiap masalah dapat ditangani segera.

Sejauh ini menurut Rahmat, PLTU Lontar terus berupaya menerapkan sistem pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan.



# Bukhori Yusuf: Fasilitas Pelayanan Haji Di Jawa Tengah Kurang Maksimal

"Jawa tengah merupakan penyumbang haji terbesar ketiga se Indonesia dan Jawa tengah memiliki luas 32.801 km2. Dengan luasnya provinsi Jawa tengah dan besarnya jumlah haji dari Jawa tengah, seharusnya Jawa tengah bisa memiliki asrama haji baru yang dapat menampung 97 kloter, Jadi tidak masalah nanti ada dua asrama haji,

## **KH. BUCHORI, Lc., M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Semarang (27/12) — Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menilai fasilitas pelayanan haji di Jawa Tengah kurang maksimal.

"Jika Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah ingin meningkatkan pelayanan, maka perlu ditambah asrama haji baru di Jawa Tengah," Ungkap Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut dalam lawatan resesnya ke kantor wilayah

Kementerian Agama Jawa tengah di Semarang, Kamis, (26/12/2019).

Lebih lanjut Bukhori mengatakan tidak maksimalnya pelayanan haji di Jawa Tengah salah satunya karena kapasitas asrama haji tidak mampu menampung jamaah haji yang berasal dari Jawa Tengah.

"Ada 10.040 jamaah haji yang berasal dari Jawa Tengah, semua berpusat di Surakarta, sementara kapasitas asrama

hanya bisa menampung 1800 tempat tidur", ujar Bukhori.

Selain itu Bukhori mengatakan, usulannya terkait pengadaan tambahan asrama haji bukan tanpa alasan.

"Jawa tengah merupakan penyumbang haji terbesar ketiga se Indonesia dan Jawa tengah memiliki luas 32.801 km2. Dengan luasnya provinsi Jawa tengah dan besarnya jumlah haji dari Jawa tengah, seharusnya Jawa tengah bisa memiliki asrama haji baru yang dapat menampung 97 kloter, Jadi tidak masalah nanti ada dua asrama haji," kata Bukhori.

Lebih lanjut Bukhori mengusulkan agar asrama haji terletak di dekat bandara.

"Pembangunan asrama haji Jawa tengah lebih cocok dekat dengan bandara yakni di Semarang dekat dengan bandara Ahmad Yani karena sudah dilengkapi akses tol yang memadai," ungkap Bukhori.

Untuk itu, Bukhori meminta agar usulannya terkait pembangunan asrama haji baru segera dengan direalisasikan.

"Daftar tunggu Jawa



tengah untuk keberangkatan haji sebanyak 746.716 orang, jika dihitung bisa sampai 25 tahun. Animo masyarakat Jawa Tengah untuk daftar haji sangat tinggi tinggi. Namun sayangnya tidak ada fasilitas yang memadai, jadi ini perlu menjadi

perhatian serius," tegas Bukhori.

# Dengar Curhat Dokter RSUD Arjawinangun, Netty Tak Kuasa Menitikan Air Mata

Jika BPJS tidak membenahi manajemen pembayarannya, saya khawatir akan banyak rumah sakit yang tidak bisa optimal melayani pasien. Akibatnya, pasien memilih lari ke rumah sakit swasta yang memiliki modal besar dan siap menalangi pembiayaan di awal

## Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Cirebon (27/12) — Kirsur BPJS seakan tak usai hadirkan persoalan. Belum lagi terbukti soal jaminan BPJS untuk menutup selisih iuran kelas III PBPJ dan BP yang kenaikanannya ditolak DPR, sejumlah rumah sakit mengeluhkan kesulitan cash flow akibat klaim yang belum dibayar.

Fakta ini mencuat saat Netty Prasetyani melakukan kunjungan ke RSUD Arjawinangun, Cirebon, Kamis, (26/12/2019).

Dalam kesempatan tersebut Netty diterima langsung Direktur RSUD Arjawinangun Dokter Bambang Sumardi dan sejumlah dokter serta tenaga medis lainnya.

"Saya sedih dan tak kuasa menahan air mata mendengar keluhan tenaga medis yang belum dibayarkan jasa pelayanannya karena rumah sakit kesulitan biaya operasional," ujar Netty setelah pertemuan tersebut.

Menurut Netty, adalah kezaliman dan kesewenangan saat dokter dan perawat bekerja namun belum dibayarkan jasanya setelah kering mereka kering.

"Jika kendalanya proses verifikasi dan validasi data, bukankah BPJS bisa cari solusi dengan menambah tenaga verifikasi. Jika kendala biaya, bukankah Menkes mengatakan kewajiban PBI sudah

ditunaikan? Bukankah memang menjadi kewajiban negara untuk mencari terobosan dan inovasi sumber pendanaan yang sah?", Pungkasnya.

Netty juga menyesalkan adanya sejumlah aturan BPJS yang menyulitkan tenaga medis menjalankan fungsi profesionalnya dengan baik.

"Bayangkan, dokter spesialis dengan kompetensi bagus dan peralatan medis memadai, kadang harus memilih tindakan pelayanan yang tidak perform karena dibatasi dengan aturan covering biaya oleh BPJS," ungkap Netty.

Jika dilakukan di luar ketentuan, kata Netty, maka resikonya klaim akan ditolak, yang menyebabkan rumah sakit rugi.

Dengan pola manajemen seperti di atas, tambah Netty, wajarlah jika muncul kesan BPJS hanya berpikir soal profit, hanya mau membayar murah pelayanan, dan tekanan kecurigaan bahwa ada banyak fraud di rumah sakit.

Netty berjanji membawa persoalan tersebut ke rapat Komisi IX pada masa persidangan berikutnya.

"Jika BPJS tidak membenahi manajemen



pembayarannya, saya khawatir akan banyak rumah sakit yang tidak bisa optimal melayani pasien. Akibatnya, pasien memilih lari ke rumah sakit swasta yang memiliki modal besar dan siap menalangi pembiayaan di awal", kata Netty.

Menurut data RSUD Arjawinangun, sebagai rumah sakit tipe B, tingkat kunjungan pasien ke poli klinik dan tingkat hunian rawat inap menurun drastis.

"Info yang saya terima, dari rerata jumlah kunjungan 11.000 - 12.000 pada 2018,

menjadi 7.000 - 8.000 pada 2019. Dari 800-an tempat tidur, hanya terisi 200-an. Kemana larinya?" ujar Netty.

Data empirik lapangan ini menjadi kekhawatiran Netty yang mengkhawatirkan kesehatan menjadi komoditas industri yang dikuasai pemodal besar atau konglomerasi.

Selengkapnya kunjungi fraksipks.id

# Perpustakaan Palangka Raya Perlu Dukungan Anggaran

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ini sudah mendapat perhatian yang sangat bagus. Dahulu hanya berbentuk badan dan sekarang sudah menjadi dinas, ini merupakan salah satu wujud perhatian untuk pengembangan perpustakaan daerah

**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQH, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah harus didorong agar lebih menarik untuk dikunjungi dan disukai masyarakat Kalteng. Pasalnya, Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul bisa dilihat dari

seberapa baik pembangunan perpustakaan dan tingkat literasinya masyarakatnya. Sangat disayangkan pengembangan perpustakaan tersebut tidak diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai.

“Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ini sudah mendapat perhatian yang sangat bagus. Dahulu hanya berbentuk badan dan sekarang sudah menjadi dinas, ini merupakan salah satu wujud perhatian untuk pengembangan perpustakaan daerah,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqh saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI meninjau Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Palangka Raya, Kalteng, Rabu (18/12/2019).

Semestinya, menurut politisi F-PKS tersebut, apabila secara kelembagaan sudah bagus harusnya didukung pula dengan anggaran yang cukup. “Anggarannya masih sangat terbatas, dari Rp 5,1 triliun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hanya Rp 3,8 miliar untuk perpustakaan dan arsip daerah ini. Meskipun alokasi tersebut di luar gaji



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqh saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI meninjau Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Foto : dpr.go.id

pegawai, tetapi harusnya ditambah lagi demi kemajuan SDM yang lebih baik,” ungkap Fikri.

Lebih lanjut, Fikri menilai kondisi tersebut bisa dibantu dari Dana Desa, karena dana itu bisa dialokasikan untuk perpustakaan daerah. Jika ingin

mengembangkan SDM unggul, maka perpustakaan harus didorong sehingga lebih menarik untuk dikunjungi dan disukai masyarakat. “Andaikan masyarakat ingin menghilangkan penat, maka bisa datang ke perpustakaan untuk mendapatkan bahan

bacaan yang mampu menyelesaikan masalah mereka. Saya kira dengan kelembagaan yang bagus harus diikuti pula dengan anggaran yang bagus,” tutup Fikri. (cas/sf)

# Legislator Sarankan Poin Penting Pengembangan TN Sebangau



Sumber : Istimewa

Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes mengatakan bahwa objek wisata Taman Nasional (TN) Sebangau di Kalimantan Tengah memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Destinasi ini semestinya masuk ke dalam destinasi prioritas, karena destinasi ini di samping luas dan unik, airnya pun berwarna hitam serta tempat habitat dari orang utan yang menjadi perhatian dari pengamat-pengamat dunia.

"Saya melihat Taman Nasional Sebangau sangat

bagus karena memiliki keunikan tersendiri. Kementerian Pariwisata harus bisa memberikan fokus yang lebih terhadap destinasi yang sangat membanggakan ini," katanya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI meninjau TN Sebangau, di Palangka Raya, Kalteng, Kamis (19/12/2019).

Legislator Fraksi PKS tersebut menilai bahwa masih banyak yang perlu dikembangkan di objek wisata yang unik ini. Dukungan anggaran menjadi nomor satu

kendala dari pengembangan destinasi TN Sebangau. Tentunya jika dengan anggaran yang cukup, maka akan menghasilkan pemasukan yang besar, artinya ini akan menjadi investasi yang luar biasa.

"Kemudian, karena merupakan destinasi kelas dunia Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola haruslah lebih handal dan memiliki kompetensi. Ke depannya turis domestik dan turis asing yang punya selera standar dapat dilayani dengan baik. Pengembangan SDM ini juga perlu perhatian dari pemerintah," tambah legislator dapil Jawa Barat V itu.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa poin yang berikutnya adalah tentang tata kelola. SDM yang bagus dan handal dapat menghasilkan tata kelola yang lebih progresif. Destinasi ini merupakan potensi luar biasa sehingga tata kelola harus cepat. Pihaknya yakin ini akan menjadi kawasan yang atraktif dan banyak orang yang berkunjung ke Palangka Raya,

Saya melihat Taman Nasional Sebangau sangat bagus karena memiliki keunikan tersendiri. Kementerian Pariwisata harus bisa memberikan fokus yang lebih terhadap destinasi yang sangat membanggakan ini

**Dr. H. FAHMI ALAYDROES, M.M.,M.Ed**

Anggota Komisi X DPR RI

nantinya ini akan memberikan efek yang luar biasa dari berbagai hal.

"Saya juga berharap dengan adanya destinasi ini pun juga berdampak positif terhadap permasalahan kesejahteraan masyarakat sekitar. Contohnya, di sini ada makanan dan minuman yang dijual, mestinya yang masyarakat sekitar, dengan dilatih menghasilkan produk yang layak dijual dan dikonsumsi. Jadi jangan lagi produk

pabrikasi besar yang dijual di destinasi ini," tutupnya. (cas/sf)

Foto : dpr.go.id,



# Munculnya JS Saving Plan, Jadi Bom Waktu Persoalan Jiwasraya Sejak 2006

Memang, dengan keputusan merilis produk JS Saving Plan, nilai aset Jiwasraya mengalami peningkatan. Dana segar dari premi nasabah itu diklaim untuk menutupi defisit keuangan perusahaan, Namun, hal itu hanya bertahan untuk sementara waktu, sebab diwaktu yang sama, akibat bunga yang meroket dari produk tersebut, menyebabkan peningkatan eskalasi risiko atas liabilitas.

## Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (27/12) — Akar permasalahan krisis keuangan PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) disebabkan oleh kesalahan penempatan investasi yang sudah berlangsung sejak 2006, hingga perusahaan itu mengalami asset liability mismatch atau ketidakseimbangan aset dengan kewajiban.

Anggota Komisi XI DPR

Anis Byarwati mengungkapkan, akhir 2009 terungkap kondisi defisit keuangan Jiwasraya terus merosot hingga di angka Rp5,7 triliun, namun pemerintah beserta manajemen Jiwasraya saat itu tidak sigap dan cermat melakukan langkah-langkah penyehatan.

Kala itu, lanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak memberi kucuran dana melalui

Penyertaan Modal Negara (PMN), hingga hanya langkah semu yang ditempuh oleh perusahaan yakni berupa reasuransi dan revaluasi aset.

"Batalnya pemberian PMN melalui penerbitan Zero Coupon Bond pada periode 2010 hingga 2011 semakin memperburuk tingkat solvabilitas perseroan per 30 November 2011 di angka Rp 6,39 triliun," kata Anis melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Menurutnya, permasalahan semakin parah ketika pada 2012 Jiwasraya menerbitkan bom waktu berupa produk JS Saving Plan dengan bunga tinggi tanpa dihitung secara rinci.

Nahasnya kala itu produk ini dianggap prestasi sehingga dilanjutkan pada 2014 dan dihentikan pada 2018 ketika Jiwasraya telah mengalami tekanan likuiditas yang sangat dalam.

"Memang, dengan keputusan merilis produk JS Saving Plan, nilai aset Jiwasraya

mengalami peningkatan. Dana segar dari premi nasabah itu diklaim untuk menutupi defisit keuangan perusahaan," katanya.

Namun, Anis menambahkan, hal itu hanya bertahan untuk sementara waktu, sebab diwaktu yang sama, akibat bunga yang meroket dari produk tersebut, menyebabkan peningkatan eskalasi risiko atas liabilitas.

Adapun produk JS Saving Plan merupakan utang perusahaan yang harus dibayar ke nasabah dengan bunga 9 persen hingga 13 persen, bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

"Skema ini sama halnya dengan tindakan gail lubang - tutup lubang," pungkasnya.

Foto : dpr.go.id



# Reses

Reses itu bikin hepi.  
Karena kita bisa saling membuka hati  
Ada yang menyampaikan aspirasi  
Ada yang memperjuangkan aspirasi sepenuh hati  
Reses itu kewajiban anggota dewan  
Sebagai sarana mendengarkan  
Semua kebutuhan masyarakat dibicarakan  
Pendidikan politik dilakukan

Reses itu menyambung silaturahmi  
Bersama kader, simpatisan dan masyarakat.  
Berjalin sinergi utk membangun negeri



# Dimiyati Dorong Program Kampung Keluarga Sejahtera



Pandeglang sudah satu tahun pasca tsunami, ini adalah ujian dan sudah semestinya Pandeglang bangkit. Dan kebangkitan itu kita harus mulai dari keluarga kita, bangun keluarga sejahtera disetiap kampung agar wisatawan pun nyaman untuk berkunjung ke Pandeglang

**Dr. H. R. A. DIMYATI**  
**NATAKUSUMAH, S.H.,M.H**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten

Pandeglang (27/12) — Reses yang dilakukan Achmad Dimiyati Natakusumah Dewan DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Pandeglang Lebak bertempat di Kecamatan Sukaresmi lebih menyoroti Kampung Keluarga Sejahtera yang berdampak terhadap daya magnet wisatawan untuk berkunjung.

"Pandeglang sudah satu tahun pasca tsunami, ini adalah ujian dan sudah semestinya Pandeglang bangkit. Dan kebangkitan itu kita harus mulai dari keluarga kita, bangun keluarga sejahtera

disetiap kampung agar wisatawan pun nyaman untuk berkunjung ke Pandeglang" ucap Dimiyati.

Pernyataan yang sekaligus pembuka dalam rangka reses tersebut direspon baik oleh warga dan dikuatkan oleh ketua kelompok sadar wisata Kecamatan Sukaresmi, Firman.

"Pandeglang adalah Kabupaten yang cukup potensial karena memiliki Sumber Daya Alam yang banyak dan indah, hanya saja kita sebagai tuan rumah masih belum siap untuk menjadi tuan rumah yang baik", ujar Firman.

Hal tersebut dikuatkan oleh Camat Sukaresmi, bahwa di kecamatan Sukaresmi masih butuh bantuan untuk penguatan kampung keluarga sejahtera (KKS) untuk mendukung program wisata yang ada.

Di akhir

acara, Dimiyati menyampaikan akan berjuang dan mengawal ajaran yang dibutuhkan masyarakat.

"Saya berupaya untuk komitmen, dalam member-samai setiap kebutuhan masyarakat agar bisa dirasakan manfaatnya", tutup Dimiyati

Foto : dpr.go.id



## Serap Aspirasi Warga Bekasi

# Mahfudz Abdurrahman Hadiri Festival Tugu Asem Ke-4

Tugu Asem sekarang bukan hanya milik warga Mustikajaya, Tugu Asem sudah milik warga Kota Bekasi. Tugu Asem sudah dikenal di kalangan masyarakat Bekasi dan Jawa Barat, daerah Asem sangat kental dengan adat istiadat Betawi.

### **MAHFUZZ ABDURRAHMAN, S.Sos**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VI

Bekasi (27/12) — Dengan Mengambil Tema "Rongga Rupa" Warga Mustikajaya menggelar Festival Tugu Asem Ke-4 di Kawasan Jalan Asem

Raya kampung Kel. Mustikasari, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi. Minggu (22/12/2019)

Berbagai kegiatan dilakukan, diantaranya bazaar makanan khas betawi, souvenir khas bekasi dan lomba membuat replika Tugu Asem sebagai icon dari kampung Ciketing.

Menurut ketua pelaksana Nur Ali, "kegiatan seperti ini dilaksanakan setiap tahun dan ini adalah yang ke-4, sementara tujuan diadakannya festival ini menurut Nur Ali "untuk mempererat tali persaudaraan antara warga masyarakat di lingkungan Ciketing dengan melestarikan budaya lokal".

Pada kegiatan tersebut hadir anggota Dewan DPR RI Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman yang memang berasal dari Dapil Kota Bekasi.

Ketika ditemui awak media, Mahfudz Abdurrahman mengatakan "Tugu Asem sekarang bukan hanya milik warga Mustikajaya, Tugu Asem sudah milik warga Kota Bekasi.

"Tugu Asem sudah dikenal di kalangan masyarakat Bekasi dan Jawa Barat, daerah Asem sangat kental dengan adat istiadat Betawi.

Festival Tugu Asem Ke-4 ini sebagai bukti yang menandakan bahwa masyarakat Mustikajaya khususnya, serta warga Bekasi umumnya sangat serius menjaga kearifan lokal, bertekad melestarikan kebudayaan kampungnya, kegiatan ini sangat keren dan saya berharap terus dilaksanakan setiap tahun agar generasi muda tahu budayanya, melestarikan budaya bukan sesuatu yang kuno tapi suatu keharusan, Bekasi punya peradaban yang baik dan patut dilestarikan, ungkap Bang Mahfudz Abdurrahman yang juga dikenal sebagai pemerhati budaya betawi bekasi.

Pada kesempatan itu pula, Mahfudz Abdurrahman menyerahkan hadiah dan piala bergilir kepada para pemenang lomba.

Dari pantauan media, Festival ini diisi dengan pertunjukan budaya betawi dan budaya lainya, mulai dari seni tari hingga pencak silat, yang dimainkan oleh puluhan sanggar seni di Mustikajaya dan para tamu undangan dari luar daerah Bekasi.



# Aleg PKS Turun Tangan Atasi Pencemaran Sungai Ciracab

Pencemaran Sungai Ciracab ini harus segera diselesaikan. Mengingat pencemaran Sungai Ciracab ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Kasihan warga di sekitar sungai yang masih menggantungkan kebutuhan air dari sungai ini

## Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten III

Tangerang (26/12) — Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto, berjanji akan membantu menuntaskan masalah pencemaran Sungai Ciracab yang melintasi Kecamatan Sukadiri dan sekitarnya di Kabupaten Tangerang.

Hal tersebut ditegaskan Mulyanto usai temu wicara dengan warga korban pencemaran Sungai Ciracab di Desa Gintung, Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Selasa (24/12/2019).

"Kami akan pelajari lebih rinci masalah yang terjadi. Jika masalah sudah dipetakan secara tepat segera kami akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk mengambil

tindakan," kata Mulyanto yang membidangi masalah Lingkungan Hidup, Energi dan Ristek di Komisi VII DPR RI.

Mulyanto juga menyampaikan bahwa pencemaran Sungai Ciracab ini harus segera diselesaikan. Mengingat pencemaran Sungai Ciracab ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun.

"Kasihan warga di sekitar sungai yang masih menggantungkan kebutuhan air dari sungai ini," kata Mulyanto.

Sedangkan salah seorang warga tokoh masyarakat, Misbah, berharap Legislator dari Banten III yang mewakili Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tersebut dapat mengusut tuntas kasus

pencemaran Sungai Ciracab.

"Berharap kunjungan dari dewan kabupaten, provinsi dan pusat bisa mengusut kasus pencemaran sungai Ciracab," kata Misbah.

Selain Misbah, Aman salah seorang petani Desa Gintung juga mengeluhkan hasil panen salahnya tidak lagi bagus sejak Sungai Ciracab tercemar. Karena sejak tahun 1990-an Sungai Ciracab menjadi irigasi untuk mengairi sawahnya dan petani desa Gintung lainnya.

"Setelah air tercemar, hasil panen sawahnya tidak lagi bagus. Hasil panennya jelek dan sering kena penyakit," kata Aman.

Turut hadir pada acara tersebut antara lain, Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten Asnin Syafiuddin, Amggota DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Syahril, Kepala Desa Gintung Sunarto, petani dan masyarakat Desa Gintung yang tedampak pencemaran Sungai Ciracab.



# Hadiri HUT PKK dan Hari Ibu, Sakinah Aljufri Serap Aspirasi Warga Sigi

“Tidak hanya di pusat, tugas para kader PKS yang menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di semua daerah pun bertujuan untuk melayani masyarakat serta mengedepankan apa yang menjadi kebaikan bagi umat, dan PKS juga pastinya akan tetap pro rakyat

## Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Fraksi PKS DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi tengah

Palu (28/12) — Anggota DPR-RI Fraksi PKS Sakinah Al-Jufri gelar reses dengan menyerap aspirasi warga kabupaten Sigi. Terlihat antusiasme warga mengikuti kegiatan serap aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2019-2024 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Pada kesempatan ini, Sakinah mengungkapkan, setiap aspirasi masyarakat yang menjadi prioritas, tentunya selalu diperjuangkan serta dikawal oleh Fraksi PKS

khususnya di DPR RI.

“Tidak hanya di pusat, tugas para kader PKS yang menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di semua daerah pun bertujuan untuk melayani masyarakat serta mengedepankan apa yang menjadi kebaikan bagi umat, dan PKS juga pastinya akan tetap pro rakyat,” ujarnya dihadapan ratusan ibu-ibu PKK Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Selasa, 24/12.

“Harapan ini tentunya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Sigi kami akan

dengar lalu kami berusaha menyampaikan, walau tentunya juga akan melalui pembahasan di DPR-RI berikutnya. Semoga akan terlaksana dengan baik sesuai keinginan masyarakat,” tegas Wakil Rakyat dari dapil Sulteng yang kini di Komisi X DPR-RI.

Turut hadir dalam Perayaan HUT PKK dan Hari Ibu Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Sigi, Hazizah Irwan Lapatta serta tim penggerak sekecamatan Dolo serta para tokoh masyarakat.

Sementara itu, Sakinah juga berpesan kepada ibu-ibu yang hadir untuk menanamkan nilai-nilai agama terhadap anaknya.

“Marilah kita sebagai ibu terus mengajarkan dan mengajak para anak kita untuk selalu mencintai kedua orang tua, dan mendidik anak kita terus belajar dan patuh terhadap nilai-nilai agama, serta bagaimana peran ibu mengajarkan anak dalam menangkal paham radikalisme, agar kelak mereka menjadi anak yang berahlak mulia dan



menjadi generasi milenial yang mampu budaya saing dengan SDM yang berkualitas, dan usahakanlah terus bangun komunikasi bersama anak kita, walau sesibuk apapun,” imbuhnya.

“Dan mudah-mudahan dengan reses ini, selain dapat

bersilaturahmi kita juga bisa menuangkan apa yang menjadi aspirasi maupun keinginan dari masyarakat pada umumnya,” pungkasnya.

# Reses ke Daerah Calon IKN, Aus Hidayat Nur Kunjungi Sultan Kutai Kartanegara



Kami siap bantu mengkomunikasikan dengan pihak BPN, Sultan siapkan saja surat-suratnya. Terutama yang akan menjadi lokasi IKN, kita akan terus kawal agar tidak ada tanah-tanah kesultanan yang terzalimi

## **KH. AUS HIDAYAT NUR**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur

Kutai Kartanegara (28/12) —  
Aggota Fraksi PKS DPR RI Dapil  
Kaltim Aus Hidayat Nur

melanjutkan perjalanan reses  
ke Kutai Kartanegara, yang  
sebagian daerahnya akan

diadakan lokasi Ibukota Negara yang baru.

Sebelum berjumpa dengan masyarakat, Aus Hidayat Nur mengunjungi Sultan Kutai Kartanegara XXI, Sultan Adji Muhammad Arifin di kediamannya.

Kunjungan Aus Hidayat Nur kali ini membuat Sultan terharu. Sebab berbeda dengan kunjungan-kunjungan sebelumnya, kunjungan kali ini sangat terasa persaudaraannya di tengah kerisauan dampak-dampak negatif pembangunan IKN.

Pada kesempatan ini, Sultan banyak bercerita tentang tanah-tanah Kesultanan. Sebenarnya, pasca pengumuman Presiden Joko Widodo terkait letak lokasi Ibukota Negara yang baru, Sultan Adji Muhammad Arifin merasa bersyukur karena Indonesia akan beribukota di daerah tempat kerajaan pertama di negeri ini.

Namun, dalam proses perpindahan ini, Sultan menyangkan adanya potensi-potensi sengketa lahan.

Utamanya adalah lahan-lahan milik keluarga Sultan yang telah turun-temurun.

Oleh karena itulah kehadiran Aus Hidayat Nur ini membuat Sultan terharu. Seakan semua keresahan jiwanya dapat tersalurkan. Mengingat Aus Hidayat Nur merupakan Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur yang bertugas di Komisi II dengan salah satu mitranya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Kami siap bantu mengkomunikasikan dengan pihak BPN, Sultan siapkan saja surat-suratnya. Terutama yang akan menjadi lokasi IKN, kita akan terus kawal agar tidak ada tanah-tanah kesultanan yang terzalimi," pesan Aus Hidayat Nur.

Dalam kesempatan kunjungan kali ini, Aus Hidayat Nur juga menyerahkan Catatan Sidang I DPR RI 2019 - 2020 yang telah dilaluinya. Sultan tampak senang menerimanya, karena merasa dihargai keberadaannya sebagai bagian dari mata rantai sejarah Indonesia.

"Kami ini semuanya tunduk pada pemerintah. Termasuk terkait keputusan perpindahan ibukota ini. Tapi hingga hari ini, tidak ada kami diajak bicara tentang perpindahan ibukota ini," ujar Sultan menyangkan.

"Jadi kami berharap kepada Pak Aus untuk menjadi penyambung masalah ini. Terima kasih telah berkunjung kesini," tutupnya saat Aus Hidayat Nur hendak pamit.



# Saat Reses Hermanto Tinjau Pembesaran Bibit Ikan Milik Masyarakat

Kelompok ini tergolong inovatif karena Lele yang di budidaya tidak dijual segar, tetapi diolah menjadi rendang lele dalam kemasan sehingga tahan lama dan jangkauan pemasarannya bisa lebih jauh.

**Dr. HERMANTO, S.E., M.M.**

Anggota Komisi IV DPR RI / Dapl Sumbang

Jakarta (25/12) — Anggota DPR RI Hermanto dalam perjalanan reses perorangannya di daerah pemilihan, Selasa (24/12), mengunjungi instalasi pembesaran ikan lele intensif (bioflok) yang dikelola Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan) Lambau Jaya di Nagari Koto Nan Tigo, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam kesempatan tersebut Hermanto menyampaikan bahwa Pokdakan ini mendapat Program Bioflok bantuan Kementerian Kelautan Perikanan tahun 2019 senilai Rp. 176 juta.

"Pokdakan Lambau Jaya



layak mendapat dukungan dari Pemerintah dalam mengembangkan usahanya karena sudah mengalami jatuh bangun dan terbukti mampu bertahan", ujar Hermanto dalam

keterangan tertulisnya.

Kelompok ini, lanjutnya, tergolong inovatif karena Lele yang di budidaya tidak dijual segar, tetapi diolah menjadi rendang lele dalam kemasan sehingga tahan lama dan jangkauan pemasarannya bisa lebih jauh.

"Saat ini sedang dilakukan perajakan untuk ekspor rendang lele ke Qatar. Penikmat lele di Qatar cukup banyak. Sejauh ini pengadaan lele di Qatar diimpor dari Thailand", ucap anggota FPKS ini.

Pengurus pokdakan lanjut Hermanto punya semangat mengganti lele Thailand di Qatar dengan lele Indonesia



**Reses**

# Anis Byarwati Serap Aspirasi Millennial Jakarta Timur

“Tetaplah hormat, santun dan berbakti kepada orang tua, seperti apapun orang tua kita. Ketahuilah bahwa semua orang tua menginginkan kebaikan untuk anak-anaknya. Namun orang tua memiliki pengalaman dan cara yang berbeda dengan anak-anak sekarang sehingga seringkali yang lebih terasa adalah perbedaannya”

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapi DKI Jakarta I

Jakarta (26/12) — Anak muda siap menerima estafeta dakwah, demikian dikatakan Muhammad Itsbat salah satu anak muda yang menjadi ketua panitia dalam acara Temu Millennial Jakarta Timur bersama Anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati.

Sebagai pembuka acara, ia menyampaikan bahwa anak muda harus terbuka dengan dunia politik dan dekat dengan politisi agar dapat menyampaikan aspirasinya.

Menanggapi suara anak muda ini, Anis Byarwati yang sedang menjalankan tugas serap aspirasi dimasa reses,

memberikan apresiasinya.

Anis menyatakan bahagia dan bangga melihat anak muda yang memiliki kesadaran, pengetahuan dan kepedulian terhadap politik. Karena di masa depan, merekalah yang akan menjadi politisi-politisi penerus perjuangan khususnya di parlemen.

Selanjutnya, Anis menjelaskan bahwa anggota DPR menunaikan tugasnya di dalam dan di luar gedung DPR.

“Tugas-tugas DPR yang dilakukan di dalam gedung meliputi tugas legislasi yakni pembuatan Undang-undang, pengawasan kinerja pemerintah

dan budgeting penyusunan anggaran bersama pemerintah”, ungkap Anis.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, Anis yang juga merupakan anggota badan legislatif menyampaikan, bahwa fraksi PKS sudah memasukkan usulan Rancangan Undang-undang (RUU) sebagai bentuk perjuangan terealisasinya 4 janji kampanye PKS.

“Keempat janji kampanye tersebut adalah berlakunya SIM seumur hidup, bebas pajak STNK kendaraan bermotor roda dua CC kecil, bebas pajak untuk penghasilan dibawah 8 juta rupiah dan perlindungan tokoh dan simbol agama”, papar Anggota Legislatif Asal DKI Jakarta ini.

Adapun tugas anggota DPR diluar gedung dewan adalah menyerap aspirasi dari masyarakat, dimana anggota dewan harus menjumpai konstituen di dapilnya. Dan waktu khusus yang dijadwalkan untuk menyerap aspirasi disebut dengan masa reses.

Para millennial yang hadir, menyampaikan berbagai pertanyaan dan aspirasi yang kritis dan cerdas. Mulai dari

pertanyaan tentang mudahnya penggunaan Undang-undang ITE, bagaimana proses pengolahan aspirasi yang telah disampaikan masyarakat setelah disampaikan kepada anggota dewan hingga masalah pengolahan limbah plastik, pajak penghasilan bisnis online, konten kreatif hingga kebiasaan millennial yang suka nonton film-film di internet yang mereka tidak tahu apakah kena pajak atau tidak.

Di akhir acara yang digelar di Dapoer Roti Panggang Pasar Rebo, (25/12/2019), Anis mendapatkan kejutan dengan kehadiran putra putrinya yang membawa berbagai hadiah

dalam rangka hari ibu.

Ia kemudian memberikan pesan kepada putra-putrinya dan juga para millennial yang hadir agar berbakti sepenuh hati kepada orang tua khususnya ibu.

“Tetaplah hormat, santun dan berbakti kepada orang tua, seperti apapun orang tua kita. Ketahuilah bahwa semua orang tua menginginkan kebaikan untuk anak-anaknya. Namun orang tua memiliki pengalaman dan cara yang berbeda dengan anak-anak sekarang sehingga seringkali yang lebih terasa adalah perbedaannya” ungkapnya mengakhiri pertemuan.



# Reses di Karawang, Ahmad Syaikhul Bertemu Bupati Celica dan Jajarannya

Kabupaten Karawang wilayah yang strategis dan terus berkembang. Diperlukan kerjasama kemitraan strategis antara Anggota DPR dan Bupati serta jajarannya

## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

Karawang (27/12) — Anggota DPR RI Ahmad Syaikhul mengadakan pertemuan dengan Bupati Karawang Celica Nurachadiana dan jajarannya, Kamis 26 Desember 2019 di Kantor Pemkab Karawang.

Kegiatan ini dalam rangka reses Ahmad Syaikhul di Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jabar yang meliputi Kab. Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Syaikhul mengajak Bupati Celica membangun kemitraan untuk memajukan Karawang.

"Kabupaten Karawang wilayah yang strategis dan terus

berkembang. Diperlukan kerjasama kemitraan strategis antara Anggota DPR dan Bupati serta jajarannya," ujar Syaikhul.

Menurut Syaikhul, dengan adanya sinergi antara semua stakeholder atau pemangku kebijakan, maka akan semakin memudahkan dalam membangun Karawang.

"Sinergi semua stakeholder harus dilakukan agar Karawang semakin maju pembangunannya," kata Syaikhul.

Bupati Celica sendiri menyambut positif kunjungan Ahmad Syaikhul. Dia mengaku senang didatangi Anggota DPR

RI.

"Saya senang sekali dengan kehadiran Ustadz Syaikhul," ungkap Celica.

Berbagai persoalan lokal dibahas dalam pertemuan tersebut. Dari masalah jalan, tragedi meninggalnya tiga mahasiswa Unsika di Gua Lele, hingga pembangunan embung atau penampung air.

Saat menerima Ahmad Syaikhul, Bupati Celica didampingi Sekretaris Daerah, Assiten Kepala Daerah, Bappeda, Kadishub, dan Kepala BPBD Kab. Karawang.





H. ROFIK HANANTO

## Silaturahmi dengan Bupati Kebumen dan Jajarannya

Kebumen, 25 Desember 2019 - Kami didampingi oleh Anggota DPRD FPKS Kab. Kebumen dan BPH DPD PKS Kebumen bersilaturahmi dengan Bupati Kebumen KH. Yazid Mahfudz di Komplek Pendopo Bupati Kebumen.

Hadir juga Kepala Dishub Kebumen Bapak R.A.I Ageng

Sulistyo Handoko dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Bapak Edi Rianto.

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

## Reses Kunjungi Kantor DPC PKS Tapos

Depok Anggota DPR RI Dapil Jabar VI yang meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., MA. melakukan kunjungan dalam rangka reses di Kantor DPC PKS Tapos pad Selasa Sore, 24

Desember 2019.

Kegiatan ini dalam rangka menyerap aspirasi konstituen di Daerah Pemilihan khususnya warga di Kecamatan Tapos Depok.



Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H

## Dorong Program Kampung Keluarga Sejahtera

Pandeglang (27/12) — Reses yang dilakukan Achmad Dimiyati Natakusumah Dewan DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Pandeglang Lebak bertempat di Kecamatan Sukaresmi lebih menyoroti Kampung Keluarga Sejahtera yang berdampak terhadap daya magnet wisatawan untuk berkunjung.

"Pandeglang sudah satu tahun pasca tsunami, ini

adalah ujian dan sudah semestinya Pandeglang bangkit. Dan kebangkitan itu kita harus mulai dari keluarga kita, bangun keluarga sejahtera disetiap kampung agar wisatawan pun nyaman untuk berkunjung ke Pandeglang " ucap Dimiyati.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

## Hadiri Wisuda STID Al-Hikmah

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Inbagan Mulyanto memberikan sambutan dalam acara Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana Mahasiswa STID Al-Hikmah, Jakarta.

Dalam sambutannya Mulyanto berpesan kepada para wisudawan Dai adalah agen perubahan. Setiap

dai harus memiliki gen perubahan, spirit bagi perubahan, serta memiliki knowledge dan know how bagi perubahan. Dalam skala nasional, dai mempunyai tugas membangun Indonesia menjadi negeri yang *baldatun, thoyyibatun wa robbun ghofur*



H. AHMAD SYAIKHU

## Bertemu Bupati Celica dan Jajarannya

Karawang (27/12) — Anggota DPR RI Ahmad Syaikhul mengadakan pertemuan dengan Bupati Karawang Celica Nurachadiana dan jajarannya, Kamis 26 Desember 2019 di Kantor Pemkab Karawang.

Kegiatan ini dalam rangka reses Ahmad Syaikhul di Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jabar yang meliputi Kab. Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Syaikhul mengajak Bupati Celica membangun kemitraan untuk memajukan Karawang. "Kabupaten Karawang wilayah yang strategis dan terus berkembang. Diperlukan kerjasama kemitraan strategis antara Anggota DPR dan Bupati serta jajarannya," ujar Syaikhul.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

## Bertemu Komunitas Pariwisata dan Pegiat Budaya

Tasikmalaya - Anggota Fraksi PKS DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat XI. Toriq Hidayat, Lc melakukan pertemuan dengan komunitas pariwisata dan pegiat

budaya se-kabupaten Tasikmalaya di kecamatan Pagerageung yang direncanakan jadi desa binaan Guarenteng



H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si

## Memberi Sambutan dan Penilaian atas Kinerja POLRI tahun 2019

Jakarta (27/12) - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil hadir memenuhi undangan Kapolri hadir memenuhi undangan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis pada kegiatan Release Akhir Tahun 2019.

Pada kesempatan tersebut Nasir Djamil diminta oleh Kapolri untuk memberikan sambutan dan penilaian atas kinerja Polri selama tahun 2019.

Nasir berharap, Polri di bawah komando Jend.Pol Idham

Azis, dapat mempertahankan capaian-capaian yang telah diraih pada tahun 2019, Semoga dukungannya masyarakat kepada polri semakin meningkat kedepannya beriringan dengan keberhasilan reformasi birokrasi dan kultural di tubuh polri.



Drs. H. ADANG DARADJATUN

## Serap Aspirasi warga Jakarta Utara

Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Adang Daradjatun mengisi masa reses dengan serap aspirasi warga Jakarta Utara.

Sebelum sesi aspirasi warga terlebih dahulu Pak Adang menyampaikan tentang tupoksi Komisi III dan Baleg DPR RI

Dalam sesi penyampaian aspirasi oleh warga, ada beberapa hal yang disampaikan di forum ini, antara lain, Mahasiswa bertanya soal bertrok saat demo RUU KUHP dan KPK. ada pula keresahan masyarakat akibat banyaknya kasus tuntutan hukum akibat UU ITE.



AMIN AK,M.M

## Silaturahmi dengan Para Kepala Desa Baru

Lumajang. Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur yang meliputi daerah Lumajang Amin Ak mengisi masa reses dengan bersilaturahmi dengan kepala-kepala desa baru di beberapa desa di kecamatan

Ranuyoso dan kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang pada Selasa, 24 Desember 2019.

Kegiatan ini dalam rangka menyerap aspirasi konstituen di Dapil khususnya Lumajang, Jatim,



H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

## Memberikan Materi TOP DPD PKS Musi Banyuasin

Musi Banyuasin Anggota DPR RI Dapil Sumsel H. Mustafa Kamal, SS, mengisi masa reses dengan agenda Training Orientasi Partai Keadilan Sejahtera (TOPKS) DPD PKS Musi Banyuasin (Muba) pada 21

Desember 2019 di Wisma Atlet Sekayu.

Acara ini juga dihadiri Ketua DPW PKS Sumsel, Muhammad Toha, S.Ag.



MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos

## Hadiri Festival Tugu Asem Ke-4

Bekasi (27/12) - Dengan Tema "Rongga Rupa" Warga Mustikajaya menggelar Festival Tugu Asem Ke-4 di Kawasan Jalan Asem Raya kampung Kel. Mustikasari, Mustikajaya, Kota Bekasi. Hadir di kegiatan ini anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kota Bekasi Mahfudz Abdurahman

Pada kesempatan itu Mahfudz mengatakan Tugu Asem sekarang bukan hanya milik warga Mustikajaya, Tugu Asem sudah milik warga Kota Bekasi. Tugu Asem sudah dikenal warga Jabar daerah Asem sangat kental dengan adat istiadat Betawi.

Habib ABOEBAKAR AL HABSZY

## Silaturahmi ke Polda Kalimantan Utara

Kaltara (27/12) - Ketua DPP PKS Wilda Kalimantan Habib Aboe Bakar Alhabszy, bersama jajaran pengurus DPW Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Utara yang dipimpin oleh Ketua Muhammad Nasir

melakukan silaturahmi dengan Kapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol. Indrajit, pada Jum'at 27 Desember 2019



**TEDDY SETIADI, S.I.Kom**

## Silaturahmi dengan Warga Cijagra

Bandung - Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat Teddy Setiadi, S.I.Kom. mengisi agenda reses dengan Menyapa dan sharing dengan para tokoh masyarakat, penggerak kegiatan warga dan

pemerhati lingkungan. di Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkung Kota Bandung.

**KH. BUKHORI, Lc., M.A**

## Tinjau Fasilitas Layanan Haji

Semarang, (26/12). Anggota Komisi VIII DPR RI, Dapil Jawa Tengah Bukhori Yusuf memulai lawatan resesnya ke kantor wilayah Kementerian Agama Jawa tengah.

Dalam lawatannya resesnya Bukhori menyortir fasilitas pelayanan haji di Jawa Tengah yang

dinilainya kurang maksimal.

Menurutnya, jika Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah ingin meningkatkan pelayanan, maka perlu ditambah asrama haji baru di Jawa Tengah.



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

## Kunjungi Kantor DPC PKS Cinere

Depok - Anggota DPR RI Dapil Jabar VI yang meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., MA. melakukan kunjungan dalam rangka reses di Kantor DPC PKS Cinere pada Rabu (25/12).

hadir pula dalam acara ini kader dari PKS Limo. Kegiatan ini dalam rangka menyerap aspirasi konstituen di Daerah Pemilihan khususnya warga di Kecamatan Cinere dan Limo, Depok.

H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

## Silaturahmi dengan Masyarakat Tente

Tente - Disela-sela masa reses Anggota DPR RI Dapil NTB I H. Johan Rosihan, ST menyempatkan diri bersilaturahmi dengan konstituennya di wilayah Tente, Dalam kesempatan ini Johan

Rosihan melakukan diskusi, dan mendengar langsung harapan serta menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya.



Hj. NEVI ZUAIRINA

## Sambangi Korban Banjir Pasaman

Pasaman. Anggota DPR RI Dapil Sumbar II Nevi Zuairina mengisi masa reses dengan mendampingi Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno beserta rombongan meninjau lokasi bencana banjir di Kabupaten Pasaman.

Dalam agenda ini Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat menyerahkan bantuan berupa uang tunai, perlengkapan sekolah, makanan, dan terpal untuk tenda pengungsian kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Pasaman.

H. ROFIK HANANTO

## Selenggarakan Media Gathering

Purbalingga - Anggota DPR RI Dapil Jateng Rofik Hananto mengisi waktu reses dengan kegiatan Silaturahmi dengan wartawan (media gathering) pada Sabtu 21 Desember 2019.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi, bertukar informasi dan saling memberikan

masukan bersama teman-teman wartawan dari berbagai media.

Rofik berharap melalui kegiatan ini akan ada sinergi dan kolaborasi dengan awak media dapat terjaga dan serta dapat ditingkatkan.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

## Reses di Kecamatan Kragilan

Banten (25/12) - Ketua Fraksi PKS DPR RI yang berasal dari dapil Banten I Dr. H. Jazuli Juwaini, MA. dan Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Serang Agus Wahyudiono melakukan kegiatan reses di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

Dalam kegiatan ini Dr. Jazuli Juwaini menjelaskan tentang sikap dan posisi PKS terhadap pemerintah. Selain itu Dr. Jazuli juga menjelaskan tentang perjuangan PKS di parlemen.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

## Memberi Tausiyah di Walantaka

Banten (25/12) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA. melakukan serap aspirasi masyarakat bersama para Ibu Majelis Taklim tim pendukung pemenangan di Perum Puri Pipitan Kecamatan Walantaka kota serang.

Dalam kesempatan ini Dr.

Jazuli memberikan tausiyah keagamaan dan juga mendapatkan pertanyaan dari para ibu anggota majelis taklim terkait peraturan Menteri Agama tentang majelis taklim taklim. Dr. Jazuli menangkap kegelisahan para ibu majelis taklim tentang aturan menteri tersebut..



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

## Kunjungi Media

Cirebon (24/12) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Dr Hj, Netty Prasetyani, M.Si., mengisi agenda reses mengunjungi kantor redaksi Fajar Cirebon dan Kabar Cirebon (24/11).

Dalam kunjungan ke Kabar Cirebon, Netty yang didampingi

oleh suaminya, Ahmad Heryawan, Gubernur Jabar (2008-2018), mengatakan, "Sebagai wakil rakyat, saya membutuhkan media untuk mengkomunikasikan kinerja Dewan kepada rakyat di dapil. Saya butuh dukungan media dalam melakukan advokasi persoalan masyarakat."

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

## Sambangi Mitra Komisi

Cirebon (24/12) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Dr Hj, Netty Prasetyani, M.Si., mengisi agenda reses dengan menyambangi mitra Komisi IX, RSUD Gunung Jati dan Dinas Kesehatan Kota Cirebon.

Pada pada pertemuan dengan RSUD Gunung Jati. Netty menerima

aspirasi diantaranya tunggakan klaim yang belum dibayar, proses verifikasi data klaim yang lambat dan kepesertaan BPJS PBI yang tiba-tiba terputus akibat data cleansing yang dilakukan BPJS,



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

## Hadiri HUT PKK dan Hari Ibu, Serap Aspirasi Warga Sigi

Palu (28/12) — Anggota DPR-RI Fraksi PKS Sakinah Al-Jufri gelar reses dengan menyerap aspirasi warga kabupaten Sigi.

Terlihat antusiasme warga mengikuti kegiatan serap aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2019-2024 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Pada kesempatan ini, Sakinah mengungkapkan, setiap aspirasi masyarakat yang menjadi prioritas, tentunya selalu diperjuangkan serta dikawal oleh Fraksi PKS khususnya di DPR RI.

“Tidak hanya di pusat, tugas para kader PKS yang menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

di semua daerah pun bertujuan untuk melayani masyarakat serta mengedepankan apa yang menjadi kebaikan bagi umat, dan PKS juga pastinya akan tetap pro rakyat,” ujarnya dihadapan ratusan ibu-ibu PKK Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Selasa, 24/12.

Turut hadir dalam Perayaan HUT PKK dan Hari Ibu Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Sigi, Hazizah Irwan Lapatta serta tim penggerak sekecamatan Dolo serta para tokoh masyarakat.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

## Kunjungi RSUD Arjawinangun

Cirebon (24/12) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Dr Hj, Netty Prasetiyani, M.Si., melanjutkan agenda reses dengan melakukan kunjungan ke RSUD Arjawinangun, Cirebon, Kamis, (26/12/2019).

Dalam kesempatan tersebut Netty diterima langsung Direktur

RSUD Arjawinangun Dokter Bambang Sumardi dan sejumlah dokter serta tenaga medis lainnya.

“Saya sedih mendengar keluhan tenaga medis yang belum dibayarkan jasanya karena rumah sakit kesulitan biaya operasional,” ujar Netty usai pertemuan itu.



**H. ROFIK HANANTO**

## Gathering dengan Pengurus PKS

Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah Rofik Hananto melakukan silaturahmi dan saling memberikan masukan bersama Pengurus Harian DPD PKS dari Dapil Jateng VI, VII dan VIII.

Menurut Rofik, kegiatan ini dapat menjadi sarana penguat

komitmen dirinya sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk terus Berkhidmat dan memperjuangkan Aspirasi masyarakat, tidak hanya dari masyarakat dapil saja, tetapi masyarakat dari lintas dapilpun harus tetap diperjuangkan.

**H. JOHAN ROSIHAN, S.T.**

## Selenggarakan TOP PKS Kota Bima

Bima - Anggota DPR RI Dapil NTB I H. Johan Rosihan, ST mengisi masa reses dengan agenda Training Orientasi Partai yang diadakan di Kota Bima.

Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan reses dirinya selaku anggota DPR RI.

Menurut Johan akan ada beberapa titik Kegiatan TOP selama reses, antara lain di Bolo (24/12), Kabupaten Bima (25/12), di Kota Bima, (24/12) di Kilo dan Woja, Dompnu, (26/12), dan Alas Barat Sumbawa. (30/12).

## PROFIL

## drh. SLAMET

Sahabat dan rekan Parlemen Fraksi PKS yang dirahmati Allah SWT. Gimana kabar? udah ambil cuti? atau sedang otw ke tempat liburan? atau mager di rumah sampe berganti tahun?

Ahad ini kayaknya suasana libur akhir tahun mulai terasa kuat berhembus, hilir mudik dipelupuk mata teman dan keluarga update status socmed di tempat liburan. .

Fraksi PKS juga gak mau kalah dong, mau update status tiap akhir pekan dengan program #KeluargaPKS. Kali ini kita akan ajak rekan dan sahabat kenal lebih dalam dengan anggota legislatif dari Jawa

Barat IV yang meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi yaitu dr.h. Slamet, pria kelahiran Rembang,19 Mei 1971. .

drh. Slamet merupakan pribadi yang tenang dan telah dikaruniai empat orang anak dari istri bernama dr. Titin M. Andadari. Dirinya terus belajar berikhtiar mampu membimbing dan memotivasi seluruh anggota keluarganya untuk taat kepada Allah. .

drh. Slamet memiliki hobi hiking dan kebiasaan olahraga. Tak hanya sibuk dengan urusan Parlemen, drh. Slamet juga adalah seorang organisatoris. Dengan berbagai kesibukannya

itu kerap meninggalkan keluarganya di rumah dalam waktu yang cukup lama. Meski begitu, kesibukan tak membuat lupa akan kewajibannya sebagai suami dan ayah di rumah tangganya.

drh. Slamet dalam kerja parlemen senantiasa memiliki motivasi tinggi untuk berkhidmat kepada rakyat. Atas dasar itu seringkali membuat keluarga merasa khawatir dengan kesehatannya. Namun drh. Slamet aktif membangun komunikasi yang positif dengan keluarga.

Keluarga sangat memahami dan bahkan memberi dukungan penuh aktivitasnya. Meskipun ada kalanya, diakui dokter hewan lulusan Universitas Udayana ini kesibukan seringkali menyita waktu kebersamaannya dengan keluarga. Pesan drh. Slamet untuk keluarga Indonesia : "Keluarga kuat, insyaallah negara akan kuat. Jadikan keluarga menjadi sarana untuk memperkokoh NKRI"

Untuk mengetahui semua kegiatan parlemen drh. Slamet dapat mengikuti social media:

**Facebook**  
Drh. H. Slamet

**Fanpage FB**  
@drhslamet



”

Keluarga kuat,  
*insya Allah* negara  
akan kuat. Jadikan  
keluarga menjadi  
sarana untuk  
memperkokoh  
NKRI





Ketahui segala informasi  
terkini ikhtiar politik  
PKS di Parlemen

*Kunjungi*

**KANAL RESMI  
FRAKSI PKS  
DPR RI**

**fraksi.pks.id**



Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



Instagram  
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter  
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)



Facebook  
Fraksi PKS DPR RI



Youtube  
PKSTV DPR RI